

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif, artinya perubahan yang terjadi pada sebuah ketidakseimbangan awal dapat menyebabkan perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan semula. Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan, salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang mempunyai angka kemiskinan yang relatif tinggi diantara daerah lainnya. Maka oleh sebab itu dengan mengetahui jumlah penduduk miskin suatu daerah telah berkurang, dapat dijadikan suatu indikator bahwa pembangunan yang dilaksanakan pada daerah tersebut membawa perubahan kondisi hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau kelompok tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proverty*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.

Menurut World Bank (2004), salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan, tingkat pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi (www.Bappenas.go.id, maret 2013).

Persoalan kemiskinan ini bisa dikatakan sudah seumur dengan sejarah manusia dan merupakan masalah yang sangat kompleks. Kemiskinan merupakan masalah global yang biasa dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia, apalagi setelah terhempas oleh pukulan krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998. Oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir, dkk, 2008).

Pada tahun 2000 beberapa negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), termasuk Indonesia yang menandatangani Deklarasi Milenium yang menunjukkan komitmen bangsa-bangsa untuk mencapai delapan sasaran pembangunan milenium (Millenium Development Goals-MDGs) dimana salah satu pointnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan absolut. Target yang ingin dicapai oleh MDGs tahun 2015 tersebut adalah mengurangi hingga setengah jumlah orang yang hidup dengan penghasilan kurang dari \$ 1 per hari dan mereka yang menderita kelaparan. Hal tersebut mencerminkan bahwa pentingnya masalah kemiskinan untuk di atasi agar taraf kehidupan rakyat menjadi berkualitas.

Menurut Badan Pusat Statistik (2015) mencatat perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 27,73 juta jiwa atau dengan persentase kemiskinan sebesar 10,96 persen berkurang sebesar 0,87 juta jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2013 yang sebesar 28,60 juta jiwa atau 11,46 persen. Walaupun mengalami penurunan tetapi angka ini masih terbilang relatif tinggi dan belum mencapai target Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 persen sampai 10 persen pada akhir tahun 2014.

Salah satu Provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Barat juga tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Secara aggregate persentase kemiskinan Sumatera Barat memang menunjukkan angka yang relatif membaik tetapi jika dilihat dari per Kab/Kota di Sumatera Barat masih ada beberapa Kabupaten yang mencatat angka kemiskinan yang termasuk kategori miskin, salah satunya yaitu pada Kabupaten Solok. Bagi pemerintah Kabupaten Solok kemiskinan merupakan salah satu isu strategis dan mendapatkan prioritas untuk ditangani. Hal tersebut terbukti dalam RPJMD Kabupaten Solok 2011-2015 dimana adanya kebijakan dan strategi dasar yang perlu dikembangkan dalam penganggulangan masalah kemiskinan (*RPJMD Kab.Solok 2011-2015*).

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Solok ini terlihat dari masih tingginya proporsi penduduk miskin pada daerah tersebut diantara Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat dari perhitungan data tahun 2000-2015. Menurut BPS dalam data dan informasi kemiskinan Kab/Kota tahun 2015, perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Solok mencapai 36,42 ribu jiwa atau persentase

kemiskinan sebesar 10,00 persen dengan garis kemiskinan sebesar Rp 339.088, indeks kedalaman 1,22 persen dan indeks keparahan 0,30 persen.

Menurut BPS (1994) garis kemiskinan merupakan indikator untuk mengukur kemiskinan disuatu wilayah, BPS menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori perhari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan non makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang serta aneka barang dan jasa. Pada umumnya terdapat dua indikator dalam mengukur kemiskinan yaitu absolut dan relatif, akan tetapi dalam penelitian ini mengukur kemiskinan dengan mengacu kepada garis kemiskinan disebut dengan kemiskinan absolut yaitu penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, sedangkan konsep kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif (Tambunan, 2001).

Pada tahun 2000 hingga 2015 BPS mencatat bahwa penduduk miskin di Kabupaten Solok mengalami trend yang berfluktuasi, dimana pada tahun 2000 penduduk miskin berjumlah 68,90 ribu jiwa dengan persentase kemiskinan sebesar 15,87 persen. Angka ini mengalami peningkatan di tahun 2001, penduduk miskin mencapai 90,4 ribu jiwa atau 20,74 persen. Walaupun ditahun 2007 hingga 2015 angka kemiskinan ini memperlihatkan trend yang pengurangan akan tetapi ditahun 2013 dan 2015 jumlah penduduk miskin Kabupaten Solok kembali mengalami sedikit peningkatan.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 sebesar 35,7 ribu jiwa atau dengan proporsi penduduk miskin sebesar 10,03 persen meningkat menjadi 36,9 ribu jiwa

atau dengan proporsi penduduk miskin sebesar 10,26 persen ditahun 2013 dan yang semula 34,48 ribu jiwa tahun 2014 meningkat menjadi 36,42 ribu jiwa atau dengan tingkat kemiskinan yang semula 9,53 persen meningkat menjadi sebesar 10,00 persen. Berdasarkan data dan informasi kemiskinan juga dapat terlihat bahwa proporsi penduduk miskin Kabupaten Solok berada pada urutan ke dua tertinggi diantara Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat setelah Kepulauan Mentawai, dimana persentase kemiskinan di Kabupaten tersebut mencapai 16,12 persen ditahun 2014.

Penyebab kemiskinan bermuara dari teori lingkaran setan, yang menyatakan bahwa produktivitas yang rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan. Lalu pendapatan yang rendah mengakibatkan tingkat kemakmuran ekonomi daerah rendah. Pengukuran kemakmuran ekonomi daerah yang lazim digunakan yaitu pendapatan perkapita, nilai ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk daerah bersangkutan pada waktu (tahun) tertentu. Maka oleh sebab itu kontribusi terbesar dalam pendapatan perkapita tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perkembangan jumlah penduduk.

Produk Domestik Regional Bruto pada umumnya digunakan sebagai indikator baik buruknya perekonomian sebuah daerah yang merupakan indikator pembangunan daerah yang sangat penting, hal ini dikarenakan PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. PDRB merupakan ekspansi dari kapasitas untuk memproduksi barang dan jasa dari suatu perekonomian atau ekspansi dari kemungkinan memproduksi (*production possibilities*) suatu perekonomian.

Secara defenisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu dan biasanya satu tahun. PDRB juga dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya dalam hal ini adalah penurunan jumlah penduduk miskin pada suatu wilayah. Maka dari itu, PDRB perkapita merupakan variabel yang sangat penting dalam penurunan kemiskinan penduduk di Kabupaten Solok. Dalam penelitian ini PDRB perkapita yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto Atas Berlaku di Kabupaten Solok.

Berdasarkan data yang dipublikasi Badan Pusat Statitik Provinsi Sumatera Barat, mencatat bahwa PDRB perkapita kabupaten Solok dari perhitungan tahun 2000 hingga 2015 terus mengalami kenaikan, pada tahun 2000 sebesar 1.267.474,34 juta rupiah dan mencapai 10.125.791,34 juta rupiah ditahun 2015. perkembangan PDRB ini juga dapat dicerminkan melalui laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuznet (dalam Tambunan, 2001) pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Hasil penelitian Hermanto S. dan Dwi W. (2008) mengatakan bahwa ketika perekonomian berkembang di suatu wilayah terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan dan memiliki distribusi pendapatan dengan baik di antara wilayah tersebut, maka akan dapat mengurangi kemiskinan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Pertumbuhan PDRB Kabupaten Solok secara agregrat nampak selalu memberikan prediksi optimistik yang selalu

berada diatas 5 persen dari tahun ke tahun dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 5,22 persen dari tahun 1999 hingga 2014.

Salah satu penyebab kemiskinan lainnya adalah tingkat pengangguran, tingkat pengangguran juga merupakan salah satu indikator pembangunan daerah yang sangat penting. Besarnya pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan disuatu negara dan dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001). Tingkat pengangguran Kabupaten Solok selama jangka waktu 16 tahun dari tahun 2000-2015 selalu melihatkan trend data yang befluktuasi dari tahun ke tahun, dimana tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada tahun 2007 yaitu sebesar 8,99 persen.

Pada tahun 2000 tingkat pengangguran hanya sebesar 2,01 persen dan relatif membaik ditahun 2014 sebesar 2,17 persen dibandingkan pada 2013 pengangguran berjumlah 5,91 persen. Di tahun 2015 tingkat pengangguran kembali meningkat menjadi 3,97 persen. Selain pengangguran tersebut penyebab kemiskinan lainnya menurut Todaro (2000) yang menyakatan bahwa variasi penyebab kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya jumlah penduduk.

World Bank, 1984 (dikutip dari Sofyardi & Helmi, 2013) juga menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat umumnya terjadi pada negara-negara berkembang, dimana hal ini akan jadi penghambat bagi pembangunan ekonomi. Selain Produk Domestik Regional Bruto yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk, perbedaan kualitas sumber daya manusia juga dapat memunculkan kemiskian (Kuncoro, 2000). Hal ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas

juga rendah, upah pun juga rendah. Upah yang rendah menyebabkan kemiskinan. SDM ini penting terutama karena kemakmuran masyarakat tentu tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi saja tetapi juga kualitas sumber daya manusia.

Jhingan (2012) juga mengatakan penyebab kemiskinan salah satunya yaitu pendidikan yang tidak memadai akan menyebabkan tingginya penduduk yang buta huruf dan tidak memiliki keterampilan dan keahlian. Selain Jhingan, World Bank (2004) juga menyatakan kemiskinan muncul karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*).

Dari pemikiran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat ditunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Solok mengalami kenaikan ditahun 2013 dan relatif tinggi yang menjadikan Kabupaten Solok mendapati peringkat kedua tertinggi diantara Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa belum maksimalnya hasil usaha pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan, padahal dampak kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian dan pembangunan daerah.

Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Solok, sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dalam usaha menurunkan tingkat kemiskinan. Maka penulis akan memberikan judul pada penelitian ini dengan judul ***“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Solok Tahun 2000-2015”***

1.2. Rumusan Masalah

Masalah kemiskinan Kabupaten Solok terlihat dari angka kemiskinannya yang masih tinggi diantara Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Badan Pusat Statistik (2015) mencatat bahwa proporsi penduduk miskin di Kabupaten Solok berada pada urutan ke dua tertinggi setelah Kepulauan Mentawai. Selain itu dalam perkembangannya walaupun mengalami pengurangan dari tahun 2007 hingga 2012, akan tetapi ditahun 2013 dan 2015 penduduk miskin kembali mencatat kenaikan yang awalnya 35,7 ribu jiwa atau 10,03 persen ditahun 2012 menjadi 36,9 ribu jiwa atau 10,26 persen ditahun 2013 dan yang semula 34,48 ribu jiwa tahun 2014 meningkat menjadi 36,42 ribu jiwa atau dengan tingkat kemiskinan yang semula 9,53 persen meningkat menjadi sebesar 10,00 persen

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi secara agregat terlihat cukup dinamis yang selalu berada diatas 5 persen yang diikuti dengan langkah-langkah pencapaian target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD Kabupaten Solok yang diharapkan akan mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 7,79 persen di tahun 2015. Oleh sebab itu penulis merasa penting untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Solok dari tahun 2000 hingga 2015. Adapun rumusan masalah yang diperoleh dari uraian latar belakang penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tren kemiskinan di Kabupaten Solok 2000-2015?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Solok?
3. Bagaimana implikasi kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Solok?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan tren kemiskinan di Kabupaten Solok 2000-2015
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Solok
3. Merumuskan beberapa implikasi kebijakan untuk mengatasi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Solok

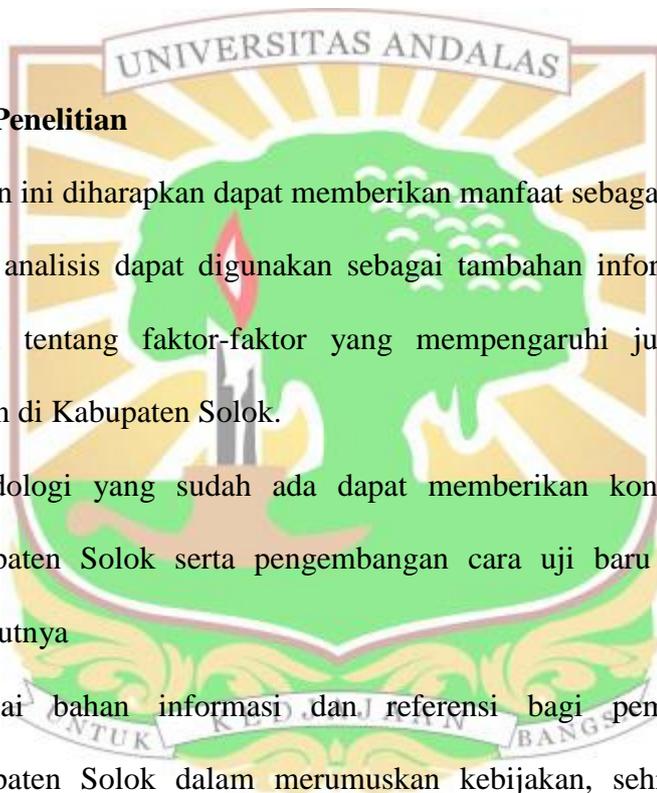
1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil analisis dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan bahan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Solok.
2. Metodologi yang sudah ada dapat memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Solok serta pengembangan cara uji baru bagi penelitian selanjutnya
3. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pemerintah daerah Kabupaten Solok dalam merumuskan kebijakan, sehingga kebijakan yang di ambil dapat di aplikasikan secara terarah dan tepat sasaran

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, untuk lebih terarah dan tercapainya tujuan, maka penulis melakukan pembatasan ruang lingkup penelitian sebagai berikut :



1. Penelitian ini dilakukan pada daerah Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat menggunakan data *time series* dalam kurun waktu 16 tahun dari periode tahun 2000 hingga tahun 2015.
2. Penelitian ini hanya membahas dan menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Solok, yaitu dengan penghitungan estimasi yang menggunakan model koreksi kesalahan atau ECM (*error correction model*) yang di estimasi dengan metode OLS (*ordinary least Square*) atau metode kuadrat terkecil biasa.
3. Pendekatan kointegrasi pada penelitian ini menggunakan pendekatan residual. Artinya, pengujian kointegrasi dilihat dari stationer residual dari hasil regresi. Metode ini digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat serta ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari konsep, definisi dan teori yang digunakan serta

penelitian-penelitian yang terkait yang pernah dilakukan sebelumnya.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan data dan sumber data, pembentukan model, definisi operasional variabel dan metode pengolahan dan analisis data.

BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Menjelaskan tentang kondisi geografis, demografis, sosial budaya dan posisi perekonomian Kabupaten Solok.

BAB V. HASIL PENELITIAN

Berisi pengolahan data, hasil dan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian dan implikasi hasil penelitian berupa kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah bagi perencanaan pengembangan Kabupaten Solok

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan akhir serta saran-saran dari penelitian yang harus dilakukan

